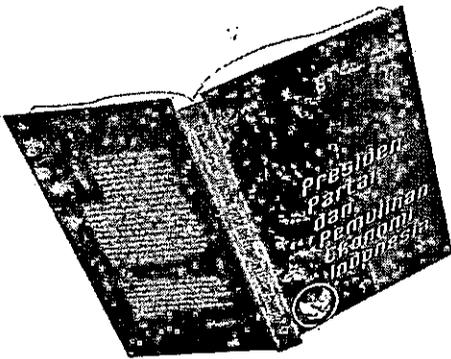


Resensi

Pembaharuan Institusi Presiden dan Pemulihan Ekonomi Indonesia



Judul : *Presiden, Partai dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*

Penulis : Bambang Cipto

Penerbit : UII Press, Yogyakarta

Cetakan : Pertama, Januari 2003

Tebal : XV + 150 halaman

ISBN : 979-3333-06-05

Wacana demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial dalam sistem pemerintahan, memang pernah menjadi rancu dalam proses bernegara di Indonesia. Perjalanan sejarah pemilihan presiden selama ini dilakukan dengan cara menyerahkan pemilihannya kepada lembaga tertinggi negara yaitu MPR. Proses semacam itu lebih mengindikasikan kedekatan sistem pada model parlementer. Jika sekarang ini (Pemilu 2004) dilakukan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, maka apakah telah terjadi proses perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia?

Dalam buku *Presiden, Partai dan Pemulihan Ekonomi Indonesia* ini, dijelaskan secara detil bahwa sebenarnya wacana-presidensial bukanlah fenomena baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hanya saja jika saat ini wacana presidensialisme muncul ke permukaan, hal ini karena terjadinya *malpraktek* demokrasi presidensial, serta beberapa bukti empiris

di beberapa negara yang cenderung memposisikan negara-negara dengan sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya membawa cerita sukses. Selain itu bagi penulis, Indonesia secara eksplisit telah menggariskan model pemerintahan dengan model presidensial sebagai mana dituliskan dalam UUD 1945.

Buku yang ditulis Bambang Cipto ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu : bagian pertama memuat tentang teori dan aplikasi demokrasi presidensial dalam sistem multi partai. Bagian kedua pemaparan kasus sistem pemerintahan presidensial di beberapa negara Amerika Latin seperti Brasil, Chile, dan Argentina. Bagian ketiga memaparkan tentang pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia serta peluang bagi partai besar dan kecil yang ada di Indonesia.

Pembahasan tentang teori demokrasi presidensial dipaparkan pada Bab I yang secara detil mengulas tentang perbedaan

model demokrasi presidensial dengan demokrasi parlementer. Selain kelebihan yang dimiliki demokrasi presidensial seperti: akuntabilitas elektoral dan kemudahan dalam melakukan identifikasi kebijakan pemerintah, model demokrasi presidensial juga rentan dengan persoalan konflik internal dan gejala kemandegan serta peluang munculnya *impeachment* terhadap presiden.

Solusi yang ditawarkan penulis untuk mengatasi sisi kelemahan model pemerintahan presidensial adalah dengan (1) mengubah sistem pemerintahan, hanya saja catatan yang perlu diingat untuk solusi pertama ini cenderung tidak populer; (2) menolak *continuisimo* jabatan presiden, yaitu menolak pemilihan presiden untuk kedua kalinya. Hanya saja model solusi ini juga memiliki celah kelemahan yaitu bertentangan dengan ruh demokrasi itu sendiri; (3) memperkuat legislatif dengan melakukan perubahan pada konstitusi. Sisi lemah solusi ini terutama jika terjadi pada negara-negara demokrasi yang didominasi oleh politisi baru yang cenderung menciptakan kondisi untuk menolak perubahan konstitusi secara komprehensif; (4) alternatif lainnya adalah membentuk sistem semi-presidensial, yang merupakan gabungan sistem pemerintahan presidensialisme dan parlementer. Model ini memungkinkan presiden dan anggota parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat, sementara kabinet bertanggungjawab kepada parlemen. Presiden akan berfungsi sebagai kepala pemerintahan hanya jika partainya menguasai mayoritas di legislatif. Model semi-presidensial memberi kekuasaan presiden untuk membubarkan badan legislatif, dan posisi presiden dalam model semi-presidensial memiliki kekuasaan yang besar sebagaimana dipraktekkan negara Perancis.

Pada bagian kedua buku ini dipaparkan beberapa kasus demokrasi presidensial

dalam multipartai seperti di Brasil, Chile dan juga Argentina. Beberapa fenomena yang dipaparkan penulis terkait dengan kasus di negara-negara Amerika Latin itu antara lain seperti munculnya kecenderungan disloyalitas di kalangan politisi, fragmentasi partai, dan rendahnya tingkat kelembagaan partai politik.

Bagian ketiga buku ini barangkali yang paling sesuai dengan situasi Indonesia saat ini. Tulisan yang mengarah pada tema-tema ini mulai dipaparkan pada bab V hingga akhir buku ini. Tema-tema seputar krisis multi-dimensional yang dihadapi bangsa Indonesia serta peluang-peluang partai politik dalam konteks pemerintahan presidensialisme dibahas secara menarik.

Terkait dengan situasi krisis yang dialami Indonesia, penulis menyatakan (Hal: 58) "sebagian besar negara-negara demokrasi baru, muncul dari reruntuhan rezim otoriter yang gagal menanggulangi krisis ekonomi. Negara demokrasi baru pada umumnya merupakan penerus langsung dari manajemen politik yang lemah dan tidak memiliki akar yang kuat ke dalam masyarakat". Lebih lanjut diungkap penulis bahwa, saat terjadi pergeseran dari rezim militer ke rezim sipil maka pemerintah-pemerintah sipil yang baru terpilih menghadapi persoalan yang hampir sama, yakni krisis ekonomi.

Membaca paparan di atas, hendaknya para pembaca tidak terjebak untuk cepat menarik sebuah simpulan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia adalah terjadinya pergeseran kekuasaan dari rezim militer yang otoriter ke rezim sipil yang cenderung demokratis. Mengutip pendapat Weffort, penulis mengungkap bahwa di negara-negara demokrasi baru pada dasarnya masih terdapat warisan orde otoriter dalam bentuk struktur negara yang tidak sepenuhnya

berubah. Di samping itu para elit masa otoriter juga tidak sepenuhnya dapat dilenyapkan dari politik (hal: 60). Tampaknya pendapat ini dapat terbenarkan dengan realita empirik kondisi politik negeri ini.

Seperti juga banyak negara di Amerika Latin, maka sebagai sebuah negara yang tengah bertransisi menuju demokrasi, Indonesia juga cenderung menganut paham neoliberal dalam memerangi krisis ekonomi yang terjadi. Hanya saja pendekatan ini pada kemudian hari tidak menampakkan kemampuannya untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sebagaimana juga terjadi di banyak negara Amerika latin. Terlebih hadirnya IMF yang semula ditasbihkan sebagai juru selamat untuk mengatasi krisis ekonomi, malah justru menjadikan ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Isu-isu yang ditawarkan Lembaga Dana Internasional (IMF) itu nampaknya tidak populer untuk iklim politik dan ekonomi Indonesia saat ini.

Belajar pada sejarah yang terjadi pada negara-negara Amerika Latin, tampaknya kurangnya arif untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi dan sebaliknya mengabaikan pembangunan politik demokratis. Situasi tersebut menurut penulis dapat menyebabkan terjadinya kemakmuran sesaat di tengah serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat keamanan dengan dalih perang melawan komunis domestik dan oposisi pada umumnya (Hal: 72). Semangat untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional secepatnya sebagai pertanggungjawaban mereka selaku politisi sipil yang terpilih menciptakan semacam kesepakatan di kalangan politisi baik di legislatif maupun eksekutif untuk mempraktekkan apa yang kemudian dikenal sebagai *hyperpresidensialism*.

Hyperpresidensialisme merupakan bentuk demokrasi presidensialisme yang

memberikan justifikasi bagi sentralisasi kekuasaan terbatas di tangan eksekutif. Pemusatan kekuasaan ini mencuat sebagai reaksi jangka pendek terhadap kebutuhan untuk mengatasi krisis ekonomi (Hal: 74).

Kebutuhan untuk mengembangkan wacana *Hyperpresidensialisme* menjadi mendesak karena (1) dalam sistem presidensialisme murni sesungguhnya wewenang presiden relatif terbatas, karena itu posisi presiden difokuskan pada persoalan keamanan dan hubungan internasional. Hal tersebut sebagaimana terjadi di Amerika Serikat; (2) bagi Indonesia, jenis-jenis kekuasaan presiden meluas ke berbagai aspek kehidupan, akan tetapi ketika dihadapkan pada krisis dewasa ini ruang lingkup tersebut menjadi terlalu lebar. Padahal untuk bertindak cepat dan tepat pada sasaran memerlukan pemusatan kekuasaan pada eksekutif, khususnya dalam menangani krisis ekonomi; (3) sistem multipartai yang berkembang pesat dewasa ini sulit menciptakan partai dengan suara mayoritas (Hal: 76-77).

Selain itu *Hyperpresidensialisme* dibutuhkan untuk memelihara masa jabatan presiden, sehingga tidak mudah dijatuhkan setiap saat oleh DPR. Kedua, hal tersebut dibutuhkan untuk memperkuat posisi eksekutif dalam menjalankan agenda ekonomi. Lebih dari itu, *Hyperpresidensialisme* dibutuhkan untuk membuka cakrawala baru bagi hubungan eksekutif-legislatif (Hal: 142).

Berdasar pada logika semacam itu, maka diperlukan penajaman kembali batas-batas kekuasaan presiden, sehingga sesuai dengan kebutuhan mendesak baik jangka pendek ataupun menengah. Tentunya dengan catatan, perombakan tersebut tidak menjadikan presiden sebagai seorang otoriter baru. Terlebih amandemen konstitusi hingga saat ini belum menyentuh persoalan

yang menyangkut kekuasaan presiden dalam menanggulangi krisis ekonomi.

Bab VI, VII, dan bab VIII sebagai bagian ketiga dari buku ini berisi tentang persoalan yang terkait dengan partai-partai baik yang kecil ataupun partai besar yang keluar sebagai pemenang pemilu 1999. Strategi yang diajukan bagi para elit politik partai kecil salah satunya adalah dengan membangun koalisi elektoral, dan mengembangkan ideologi moderat. Selain itu penulis juga mengajukan beberapa saran praktis bagi para elit partai kecil, misalnya, dalam hal desain kampanye, isu dan beberapa persiapan praktis lainnya (Hal: 83-92).

Selanjutnya bagi partai besar pemenang pemilu 1999 terutama PDIP, Partai Golkar dan PPP. Sebagai partai yang lama (meski dengan kemasan baru), ketiga partai ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelemahan yang menonjol adalah konflik internal yang melanda partai-partai tersebut. Sebagai misal Partai Golkar, sejak pemilihan Akbar Tanjung sebagai ketua umum tampak bahwa barisan elit yang menunggu giliran untuk duduk dipuncak organisasi partai beringin ini tidak sedikit. Banyak fungsionaris yang merasa dirinya jauh lebih baik dari yang lain karena telah bertahun-tahun ditempa sebagai politisi (Hal: 110). Lebih jauh diungkap penulis, generasi muda Golkar yang sebelum Suharto jatuh telah sangat berharap akan menduduki kursi menteri atau pejabat eksekutif di awal tahun 2002 kini menghadapi kenyataan bahwa harapan itu tampaknya akan sulit diwujudkan dengan sekadar menunggu giliran secara alamiah.

Pada bagian lain, penulis mengungkap, jika konflik antar kubu benar-benar meledak karena masing-masing tetap berharap untuk menduduki kursi puncak atau dekat dengan

akses kekuasaan, maka bisa diperkirakan bahwa akan banyak partai-partai baru yang bermunculan dari Golkar (Hal: 111). Prediksi ini ternyata terbukti. Beberapa partai baru memang muncul sebagai "sempalan" dari Golkar.

Sebagai sebuah buku yang kental bemuansa akademik, karya Bambang Cipto ini dapat dinyatakan runtut. Hanya saja pemaparan kasus di beberapa negara Amerika Latin dalam bab tersendiri cenderung menjadikan buku ini kehilangan rantai kognitif yang menghubungkan pembaca dari bab II menuju bab V. Jika memang hendak menjadikan sebagai sebuah bukti empirik tentang ulasan-ulasan kegagalan pendekatan neoliberal dalam mengatasi krisis di negara demokrasi baru, tampaknya bahasan dengan mengangkat kasus negara Brasil, Chile ataupun Argentina tidak perlu dibuat dalam bab tersendiri. Pembaca akan mengalami kelelahan kognitif saat mencoba menghubungkan bab II ke bab V yang sebenarnya merupakan sebuah rantai bahasan yang menarik.

Selain itu, buku ini perlu dilengkapi dengan penjelasan istilah-istilah yang digunakan di dalamnya. Penjelasan ini akan membantu pembaca yang awam tentang istilah tersebut. Penambahan indeks subjek juga akan sangat membantu pembaca mencari tema yang diinginkan.

Terlepas dari kelemahan itu, buku ini secara akademik akan membekali mereka yang sedang menekuni studi tentang ilmu politik. Bahkan bagi para politisi ataupun mereka yang saat ini baru terjun pada dunia politik praktis, buku ini dapat menjadi rujukan ide dalam membuat desain kampanye agar dapat menarik simpati masyarakat pemilih. ●

(Muhammad Idrus)

